

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2019-2022**

Herni Sunarya
Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Kupang
[E-mail:hernisunarya2@gmail.com](mailto:hernisunarya2@gmail.com)

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2022 dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Jenis penelitian yaitu Deskriptif Kuantitatif dan jenis data yaitu data Sekunder data yang diolah adalah Laporan Realisasi APBD dari ketiga Kabupaten yaitu Kabupaten manggarai, kabupaten manggarai Timur dan kabupaten Barat tahun anggaran 2019 s.d 2022, data tersebut diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah dari ketiga kabupaten yang diteliti yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur Dan Kabupaten Manggarai Barat. Adapun rasio keuangan yang digunakan meliputi: rasio varians pendapatan, rasio varians belanja, rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas pendapatans asli daerah, rasio efesiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kinerja keuangan Kabupaten Manggarai (a) Rasio Varians Pendapatan dikatakan Baik. Hal ini di tunjukan dengan realisasi pendapatan 2019 s.d 2020 lebih besar dari anggaran pendapatan dan di tahun 2021 mengalami perubahan dalam hal ini Kurang Baik, (b) Rasio Varians Belanja dikatakan Baik. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun 2019 s.d 2021 Realisasi Belanja kurang dari anggaran belanja. (c) Derajat Desentralisasi dikatakan Efektif. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun 2019 s.d 2021 tingkat pencapaian Rata-rata Derajat Desentralisasi berada diantara 80% s.d 90%, (d) rasio Efektifitas PAD dikatakan sangat efektif. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun anggaran 2019 s.d 2021 tingkat pencapaian rata-rata, PADnya melebihi 100%. (e) Tingkat Kinerja efisiensi Belanja dikatakan Kurang Efisien. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun 2019 s.d 2021 tingkat pencapaian rata-rata berada diantara 90% s.d 100%. (2) Kinerja Keuangan Kabupaten Manggarai Timur (a) Rasio Varians pendapatan dikatakan Kurang Baik. Hal ini di tunjukan dengan realisasi pendapatan selama tahun 2019 s.d 2022 Kurang dari anggaran pendapatan. (b) Rasio Varians Belanja dikatakan baik. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun 2019 s.d 2022 Realisasi Belanja kurang dari anggaran belanja. (c) Tingkat kriteria Derajat Desentralisasi dikatakan Kurang Efektif. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun 2019 s.d 2022 tingkat pencapaian rata-rata Derajat Desentralisasi Kurang dari 60% (d) Tingkat Kinerja Efektifitas PAD dikatakan kurang efektif. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun 2019 s.d 2022 tingkat pencapaian rata-rata berada diantara 60% s.d 80%. (e) Rasio Efisiensi Belanja dikatakan Kurang Efisien. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun 2019 s.d 2022 tingkat pencapaian rata-rata efisiensi Belanja berada diantara 90% s.d 100%. (3) kinerja keuangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 s.d 2022 (a) Rasio Varians pendapatan dikatakan Kurang baik. Hal ini di tunjukan dengan realisasi pendapatan 2019 s.d 2022 kurang dari dari anggaran pendapatan, (b) Tasio Varians Belanja dikatakan baik. Hal ini di tunjukan bahwa selama tahun 2019 s.d 2022 Realisasi Belanja kurang dari anggaran belanja. (c) Rasio Derajat Desentralisasi dikatakan kurang efektif. (d) Rasio Efektifitas PAD di katakan efektif. Hal ini di tunjukan dengan pencapaian bahwa selama tahun 2019 s.d 2022 rata-rata berada diantara 90% s.d 100% (e) Rasio Efisiensi Belanja dikatakan Cukup efisien. Hal ini dilihat dari pencapaian efisiensi rata-rata berada diantara 80% s.d 90%

Kata kunci : efektifitas, efisiensi derajat desentralisasi, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media data yang merangkum seluruh kegiatan industri ataupun lembaga. Bila data ini disajikan dengan benar, data tersebut sangat bermanfaat untuk siapa saja buat pengambilan keputusan (Harahap 2015, 36). Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah wilayah selaku wujud pertanggung jawaban atas penerapan APBD wajib disusun serta disajikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (Ratna, 2016)

Analisis kinerja keuangan daerah dapat digunakan pengguna laporan keuangan daerah untuk memahami kinerja pemerintah daerah. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari ketiga Kabupaten yaitu kabupaten manggarai, kabupaten manggarai timur dan kabupaten manggarai barat yang secara administratif berada di daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ketiga Kabupaten tersebut merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relative memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan khususnya PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya

Analisis kinerja keuangan ini dimaksudkan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dilain sisi berusaha mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga mendorong serta menjadikan Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri, baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011: 1), laporan keuangan merupakan Sesuatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan serta kinerja suatu entitas, Sedangkan Menurut

PSAK No. 1 (2015:1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Pengertian laporan keuangan menurut Agnes Sawir (2015: 5), laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi, Tiap transaksi yang bisa diukur dengan nilai duit dicatat serta diolah sedemikian rupa, laporan akhir juga disajikan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu catatan atau menggambarkan, posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu priode tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten dan merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya

Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Banyak pihak yang masih berpandangan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan saja. Laporan keuangan yang disajikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah.
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyariatkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Kinerja

Permendagri Nomor. 21 Tahun 2011 (Bab 1, pasal 1: 32) menyebutkan kalau kinerja merupakan keluaran ataupun hasil dari aktivitas ataupun program yang hendak ataupun sudah dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas serta mutu yang terukur. Kinerja ialah sesuatu kondisi yang wajib dikenal serta dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengenali tingkatan pencapaian hasil sesuatu lembaga dihubungkan dengan visi yang diemban sesuatu organisasi ataupun industri dan mengetahui akibat positif serta negatif dari sesuatu kebijakan operasional.

Kinerja ialah sesuatu konstruk (construk) yang bersifat multimendisional, pengukurannya pula bermacam- macam bergantung pada kompleksitas faktor- faktor yang membentuk kinerja. Sebagian pihak berkomentar kalau kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), sebab hasil kerja membagikan keterkaitan yang kokoh terhadap tujuan- tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusi ekonomi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

merupakan pengukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai. Menurut Abdul Halim (2012) Kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan menurut Mahmudi (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah tercermin dalam laporan keuangan neraca, realisasi anggaran, dan laporan arus kas yang kemudian dianalisis untuk bisa memberikan jawaban terkait kinerja pemerintah.

Rasio keuangan

Menurut Hery (2017) "rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Menurut Kasmir (2018:104), "merujuk rasio keuangan adalah tindakan untuk melihat angka-angka yang terkandung dalam laporan anggaran dengan membagi satu angka dengan angka lainnya". Dengan adanya pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah suatu petunjuk atau suatu indikasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau instansi

a. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (favourable variance), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavourable variance). (Tutut Dewi Astuti 2015)

Rumus : Analisis Varians pendapatan = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan

b. Analisis Rasio Varians Belanja daerah

Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Varians belanja daerah dapat dihitung dngan menggunakan rumus : Varians = Relisasi Belanja - Anggaran Belanja

c. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerima daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. (Rahayu, 2016;66). Rumus perhitungannya sebagai berikut : $PAD / Total\ Pendapata\ Daerah \times 100\%$

d. Analisis Rasio Efektifitas pendapatan asli daerah (PAD)

Menghitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang dianggarkan, rasio efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika sesuai dengan yang ditargetkan (Rahayu:2016). Rumus : $Realisasi\ PAD / Target\ PAD \times 100\%$

e. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi yakni Rasio perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan

anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, (Mahmud:2010). Rumus : $\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja} \times 100\%$

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini fokus pada laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat yaitu pada tahun 2019-2022

Jenis Data

Penelitian ini memakai rancangan riset tata cara deskriptif kuantitatif ialah riset yang membagikan cerminan ataupun lukisan secara sistematis, faktual, serta akurat menimpa fakta-fakta dan kondisi sesungguhnya tentang kinerja pemerintah daerah Kabupaten manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kuantitatif (Ratna, 2016).

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi, memenuhi dan menyusun skripsi ini melalui prosedur pengumpulan data yaitu dengan cara tindi dokumen dan wawancara.

Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan rasio varian Pendapatan, Varians Belanja, Dearajat Desentralisasi, Analisis Rasio Efektifitas pendapatan asli daerah (PAD), Analisis Rasio Efisiensi Belanja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dari ketiga kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, Peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan, sebagai entitas Akuntansi dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk perhitungan analisis Rasio Keuangan berdasarkan data-data keuangan yang telah diperoleh, maka perhitungan analisis Rasio Keuangan meliputi Analisis Varians Pendapatan, Analisis Rasio Varians Belanja daerah, Derajat Desentralisasi, Analisis Rasio Efektifitas pendapatan asli daerah (PAD), Analisis Rasio Efisiensi Belanja. maka pembahasan masing-masing kinerja keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Rasio Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*). Varians pendapatan tiga kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 : Varian Pendapatan Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggaraia Barat

| Tempat | Tahun | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kab. Manggarai | Baik | Baik | Kurang Baik | - |
| Kab. Matim | Kurang Baik | Kurang Baik | Kurang Baik | Kurang Baik |
| Kab. Mabar | Kurang Baik | Kurang Baik | Kurang Baik | Kurang Baik |

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2023

Dari hasil analisis varian pendapatan sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa varian pendapatan tiga kabupaten yakni Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Manggarai dri tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kinerja Kurang Baik

Rasio Varians Belanja

Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Hasil analisis varian belanja dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 : Varian Belanja Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggaraia Barat

| Tempat | Tahun | | | |
|----------------|-------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kab. Manggarai | Baik | Baik | Baik | - |
| Kab. Matim | Baik | Baik | Baik | Baik |
| Kab. Barat | Baik | Baik | Baik | Baik |

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2023

Dari hasil analisis varian belanja sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa varian pendapatan tiga kabupaten yakni Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Manggarai dri tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kinerja Baik, artinya pemerintah daerah tiga kabupaten semuanya melakukan efsiensi belanja.

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan Asli Daerah dengn total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerima daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintahdaerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hasil analisis derajat desentralisasi tiga kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggaraia Barat

| Tempat | Rasio Pecapaian pertahun | | | | Nilai Rata-rata | Kinerja |
|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Kab. Manggarai | 85,66% | 83,77% | 85,66% | | 84,54% | Efektir |
| Kab. Matim | 48,84% | 45,79% | 39,99% | 31,22% | 41,46% | Kurang Efektif |
| Kab. Mabar | 14,60% | 8,90% | 14,20% | 15,20% | 13,22% | Kurang Efektif |

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2023

Dari hasil analisis drajat desentralisasi sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa derajat desentralisasi kabupaten Manggarai Manggarai dinilai Efektif, sedangkan kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kinerja Efektif

Analisis Rasio Efektifitas pendapatan asli daerah (PAD)

Menghitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang dianggarkan, rasio efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah jika sesuai dengan yang ditargetkan. Hasil perhitungan kinerja pendapatan asli daerah tiga kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4 : Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggaraia Barat

| Tempat | Rasio Penerimaan pertahun | | | | Nilai Rata-rata | Kinerja |
|----------------|---------------------------|---------|--------|--------|-----------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Kab. Manggarai | 108,67% | 103,83% | 94,07% | | 102.19% | Efektif |
| Kab. Matim | 88,15% | 87,92% | 66,50% | 55,56% | 74,53% | Kurang Efektif |
| Kab. Mabar | 102.77% | 82.34% | 94.91% | 94.36% | 93,59% | Efektif |

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2023

Dari hasil analisis rasio pendapatan Asli daerah sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa Kinerja kabupaten Manggarai Manggarai dan Manggarai Barat dinilai Efektif, sedangkan kabupaten Manggarai timur menunjukkan kinerja Efektif

Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi yakni Rasio perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan Anggaran. Hasil analisis rasio efisiensi belanja tiga kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5 : Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggaraia Barat

| Tempat | Rasio Penerimaan pertahun | | | | Nilai Rata-rata | Kinerja |
|----------------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Kab. Manggarai | 94,46% | 93,71% | 92,43% | | 93,53% | Efektif |
| Kab. Matim | 94,15% | 92,65% | 93,71% | 85,30% | 91,45% | Efektif |
| Kab. Mabar | 91,92% | 91.75% | 74.46% | 93,75% | 87,97% | Efektif |

Sumber : Data sekunder olahan penulis tahun 2023

Dari hasil analisis rasio Belanja daerah sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa Kinerja kabupaten Manggarai Manggarai , Manggarai Barat dan Manggarai Timur semuanya menunjukkan kinerja Belanja Efektif artinya pemerintah ketiga kabupaten melakukan efisiensi belanja daerah.

KESIMPULAN

Varian pendapatan tiga kabupaten yakni Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Manggarai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kinerja Kurang Baik, varian pendapatan tiga kabupaten yakni Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Manggarai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kinerja Baik, artinya pemerintah daerah tiga kabupaten semuanya melakukan efisiensi belanja, derajat desentralisasi kabupaten Manggarai Manggarai dinilai Efektif, sedangkan kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kinerja kurang Efektif, Kinerja kabupaten Manggarai Manggarai dan Manggarai Barat dinilai Efektif, sedangkan kabupaten Manggarai timur menunjukkan kinerja kurang Efektif, Kinerja kabupaten Manggarai Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur semuanya menunjukkan kinerja Belanja Efektif artinya pemerintah ketiga kabupaten melakukan efisiensi belanja daerah.

SARAN

Disarankan agar pemerintah daerah Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Manggarai dapat meningkatkan varian Belanja, derajat desentralisasi kabupaten Manggarai Manggarai Timur dan Manggarai Barat disarankan agar dapat meningkatkan derajat desentralisasi, untuk Pendapat Asli Daerah disarankan agar pemerintah Manggarai Timur dapat meningkatkan efektifitas penerimaannya

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Arief, K., & Iahak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesia Accounting Research jurnal*, *II*, 52-62.
- Dora, J. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014. 1-95.
- Jannah Dien, A. N., & Tinangon, J. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Emba*, *III*, 534-541.
- Natalia, L., & Astuti, T. D. (2015). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Seleman. *Jurnal Sosio-Humaniora*, *VI*, 55-72.
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemekasan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, *I*, 57-80.
- Ruliaty, Badillahi, I., & Nurfadillah, A. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, *1*, 40-66. Retrieved from <http://journal.unismu.ac.id/index.php/invoice>
- Abdul, Halim. (2014). *Akuntansi sector public akuntansi keuangan daerah*, Jakarta. *salemba empat*.
- Kainde, C. (2013). Analisis varians dan pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1(3)*.393-400